



Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Wisata *Lingko Lodok* di Desa Poco Rutang, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat

Getrudis A. Amanda¹, Ajis Salim Adang Djaha², Rouwland A. Benyamin³,
Hendrik Toda⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Nusa Cendana

Email:

¹elldaamanda662@gmail.com,

²ajisdjaha@staf.undana.ac.id,

³rouwland.benyamin@staf.undana.ac.id,

⁴hendrik.toda@staf.undana.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran strategis Pemerintah Desa Poco Rutang dalam pengembangan destinasi wisata *Lingko Lodok* di Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menganalisis implementasi peran pemerintah desa berdasarkan empat dimensi teoritis: sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator, dan stimulator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melakukan berbagai inisiatif seperti promosi digital, pembangunan infrastruktur wisata, pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dan pemberian insentif kepada pelaku usaha lokal. Namun, efektivitas pelaksanaan masih terbatas oleh beberapa kendala, antara lain rendahnya partisipasi pemuda, konflik sosial antarkelompok, serta belum optimalnya koordinasi lintas aktor pembangunan. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi fungsi kelembagaan dan rekonsiliasi sosial dalam tata kelola desa wisata berbasis potensi lokal. Penelitian ini berkontribusi terhadap penguatan konseptual model pembangunan pariwisata desa yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Peran Pemerintah Desa, Desa Wisata, *Lingko Lodok*, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Berbasis Lokal

Abstract

This study aims to examine the strategic role of the Poco Rutang Village Government in developing the Lingko Lodok tourist destination in Lembor Subdistrict, West Manggarai Regency. Using a descriptive qualitative approach, this study analyses the implementation of the village government's role based on four theoretical dimensions: as an entrepreneur, coordinator, facilitator, and stimulator. The results show that the village government has implemented various initiatives, such as digital promotion, tourism infrastructure development, the formation of Tourism Awareness Groups (Pokdarwis), and the provision of incentives to local businesses. However, the effectiveness of implementation is still limited by several constraints, including low youth participation, social conflicts between groups, and suboptimal coordination among development actors. These findings emphasise the importance

of institutional integration and social reconciliation in the governance of tourism villages based on local potential. This research contributes to strengthening the conceptual model of inclusive, participatory, and sustainable village tourism development.

Keywords: *Role of Village Government, Tourism Village, Lingko Lodok, Community Participation, Local-Based Development*

1. Pendahuluan

Salah satu komponen penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pemberdayaan desa sebagai unit terkecil pemerintahan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan. Desa, dengan segala potensinya, menjadi titik sentral bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang menonjol dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa adalah pengembangan desa wisata, yaitu integrasi antara potensi lokal, kearifan budaya, dan kegiatan pariwisata yang mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mendorong dan memfasilitasi pembentukan serta pengembangan desa wisata secara terstruktur dan berkelanjutan (Sasongko, 2022). Kabupaten Manggarai Barat, sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, turut berupaya memaksimalkan potensi desa melalui pembangunan sektor pariwisata berbasis lokal. Salah satu desa yang menjadi fokus pengembangan adalah Desa Poco Rutang, yang memiliki daya tarik alam dan budaya, terutama dalam bentuk lanskap pertanian sawah lodok berbentuk jaring laba-laba, yang dikenal sebagai *Lingko Lodok*.

Konsep pembangunan desa berbasis pariwisata pada dasarnya sejalan dengan prinsip *community-based tourism* (CBT), yaitu model pengembangan pariwisata yang bertumpu pada partisipasi aktif masyarakat lokal sebagai pelaku utama. Dalam kerangka tersebut, peran pemerintah bukan hanya sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai fasilitator, stimulator, dan koordinator. Keberhasilan pengembangan desa wisata sangat tergantung pada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan aktor lain yang relevan. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 11 Tahun 2022 menggarisbawahi bahwa desa wisata merupakan lokomotif penggerak perekonomian daerah yang harus dikembangkan dengan prinsip keberlanjutan, gotong royong, dan kemandirian (Kemenparekraf, 2022).

Lebih lanjut, pengembangan desa wisata juga memerlukan integrasi antara kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan potensi lokalnya, yang pada saat bersamaan harus merujuk pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota (Pemerintah Pusat Republik Indonesia, 2014). Dalam konteks Kabupaten Manggarai Barat, penguatan sektor pariwisata telah menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026, dengan penekanan pada penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan penguatan kerja sama antardaerah (Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, 2021). Hal ini membuka ruang bagi desa-desa seperti Poco Rutang untuk mengambil peran strategis dalam pengembangan pariwisata berbasis potensi kultural dan ekologis.

Namun, implementasi konsep tersebut di lapangan tidak selalu berjalan ideal. Hasil observasi dan penelusuran di Desa Poco Rutang menunjukkan bahwa meskipun desa ini telah ditetapkan sebagai salah satu destinasi wisata potensial berdasarkan SK Bupati Manggarai Barat, pengembangan wisata *Lingko Lodok* masih menghadapi berbagai hambatan. Permasalahan muncul baik dari

aspek sosial, seperti minimnya partisipasi masyarakat akibat konflik pasca pemilihan kepala desa, maupun dari aspek kelembagaan, seperti belum optimalnya pengelolaan aset wisata dan keterlibatan petani sebagai pemilik lahan (Sambung, 2021). Selain itu, masih terdapat ketimpangan dalam distribusi manfaat ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas wisata, serta belum terintegrasinya sektor pertanian ke dalam aktivitas wisata sebagai atraksi edukatif, yang seharusnya bisa menambah nilai dan keberlanjutan destinasi.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah mengkaji efektivitas peran pemerintah dalam pengembangan desa wisata di berbagai daerah. Gautama dkk. (2020) menemukan bahwa peran pemerintah sebagai fasilitator terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dan partisipasi dalam pengelolaan desa wisata. Kirana & Artisa (2020) menyoroti pentingnya penerapan *collaborative governance* dalam menciptakan kolaborasi lintas sektor. Setiawati & Aji (2020) menekankan pada nilai edukatif dan budaya pelayanan dalam penerapan prinsip Sapta Pesona di desa wisata. Sementara itu, Wahyuningsih & Pradana (2021), serta Syaifudin & Ma'ruf (2022), menyoroti keterbatasan pemerintah desa dalam hal promosi, pendampingan, dan koordinasi lintas aktor. Fahira dkk. (2022) menunjukkan pentingnya dukungan digital dan pelibatan pemuda dalam pengembangan pariwisata. Namun, belum banyak kajian yang secara khusus menelaah secara mendalam peran pemerintah desa dalam konteks sosial-politik yang kompleks, seperti yang terjadi di Desa Poco Rutang.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk melihat bagaimana pemerintah desa memainkan perannya dalam pengembangan destinasi wisata *Lingko Lodok*, di tengah tantangan sosial yang ada, serta bagaimana peran tersebut diimplementasikan melalui fungsi sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator, dan stimulator. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan, tetapi juga menganalisis secara kritis efektivitas peran tersebut berdasarkan dinamika lokal dan kebijakan desa yang telah ditetapkan.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada kebutuhan akan pemahaman yang lebih mendalam terkait model intervensi pemerintah desa dalam konteks pembangunan pariwisata yang inklusif dan partisipatif. Dengan memfokuskan pada Desa Poco Rutang sebagai studi kasus, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik maupun praktis terhadap penguatan peran pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pemerintah desa dalam pengembangan destinasi wisata *Lingko Lodok*, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi keberhasilannya dalam konteks pembangunan berbasis potensi lokal.

Tinjauan Pustaka

Pengembangan desa wisata telah menjadi salah satu strategi utama dalam pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan kesejahteraan berbasis potensi lokal. Konsep *community-based tourism* (CBT) menjadi pendekatan dominan yang banyak dibahas dalam literatur, di mana partisipasi aktif masyarakat lokal merupakan fondasi utama pengembangan pariwisata yang berkelanjutan (Kirana & Artisa, 2020). Dalam konteks ini, peran pemerintah desa sangat krusial sebagai penggerak, fasilitator, dan koordinator pembangunan pariwisata berbasis komunitas.

Beberapa penelitian sebelumnya menyoroti pentingnya peran pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata dari berbagai perspektif. Gautama dkk. (2020) menemukan bahwa peran fasilitatif pemerintah desa mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan potensi wisata. Temuan ini diperkuat oleh Wahyuningsih & Pradana (2021), yang menunjukkan bahwa partisipasi warga dan peningkatan pelayanan berbasis Sapta Pesona sangat dipengaruhi oleh dukungan struktural dari pemerintah desa. Namun, riset dari Syaifudin & Ma'ruf (2022)

mengungkapkan adanya tantangan koordinasi lintas sektor dan lemahnya promosi sebagai hambatan dalam optimalisasi peran pemerintah desa.

Lebih jauh, pendekatan *collaborative governance* dinilai efektif untuk mengatasi kompleksitas dalam pengembangan desa wisata. Kirana & Artisa (2020) menekankan bahwa keterlibatan berbagai aktor seperti masyarakat, sektor swasta, dan lembaga pemerintah membutuhkan mekanisme kolaboratif yang dikoordinasikan secara aktif oleh pemerintah desa. Hal ini sejalan dengan gagasan Habibi (2022) yang menyoroti pentingnya harmoni sosial dalam keberhasilan kolaborasi pembangunan desa wisata. Dalam konteks sosial-politik yang penuh tantangan, seperti konflik pasca pemilihan kepala desa, peran pemerintah desa sebagai *rekonsiliator sosial* menjadi dimensi penting yang belum banyak digali dalam literatur sebelumnya.

Dari aspek infrastruktur dan kelembagaan, studi oleh Fahira dkk. (2022) menekankan bahwa penyediaan fasilitas fisik, perbaikan aksesibilitas, dan pelibatan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) berkontribusi signifikan terhadap kenyamanan pengunjung dan keberlanjutan pariwisata. Sementara itu, pendekatan *asset-based community development* (ABCD) yang dikaji oleh Andryani dkk. (2023) menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata yang berfokus pada kekuatan lokal akan lebih efektif jika dikombinasikan dengan penguatan kapasitas kelembagaan dan rekayasa fasilitas adaptif.

Peran stimulator dari pemerintah desa juga disorot dalam beberapa studi. Mulyana dkk. (2022) dan Iswanti & Zulkarnaini (2022) menunjukkan bahwa kebijakan insentif sederhana, seperti potongan sewa atau penghargaan simbolik, mampu meningkatkan motivasi dan loyalitas pelaku lokal dalam pengelolaan desa wisata. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat dimensi sosial tetapi juga menciptakan iklim kewirausahaan dan gotong royong yang penting bagi keberlanjutan ekonomi desa.

Berdasarkan kajian literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata mencakup dimensi yang luas: mulai dari fasilitasi dan koordinasi, hingga rekonsiliasi sosial dan pemberdayaan ekonomi mikro. Namun, sebagian besar penelitian terdahulu belum secara spesifik mengkaji peran pemerintah desa dalam situasi sosial-politik yang kompleks atau pasca-konflik.

Untuk menjembatani celah ini, penelitian ini menggunakan kerangka teori Blakely (1989 dalam Tomlinson, 1990), yang memetakan peran pemerintah lokal ke dalam empat dimensi utama: entrepreneur, koordinator, fasilitator, dan stimulator. Teori ini dipilih karena menyediakan lensa analisis yang komprehensif dalam memahami peran strategis pemerintah desa, baik dari aspek ekonomi maupun sosial. Dengan demikian, penggunaan kerangka ini dianggap relevan untuk mengevaluasi sejauh mana pemerintah desa berkontribusi dalam mendorong pembangunan pariwisata lokal berbasis aset desa, partisipasi masyarakat, serta dinamika sosial-politik yang menyertainya.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara sistematis peran pemerintah desa dalam pengembangan destinasi wisata *Lingko Lodok* di Desa Poco Rutang, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. Pendekatan ini sesuai digunakan untuk mengkaji fenomena sosial dan kebijakan lokal dalam konteks nyata, dengan fokus pada makna dan proses yang terjadi (Creswell & Creswell, 2018). Penggunaan pendekatan ini juga memungkinkan peneliti memperoleh data secara mendalam melalui interaksi langsung dengan informan dan realitas di lapangan (Moleong, 2018).

Lokasi penelitian ditentukan secara purposif di Desa Poco Rutang karena desa ini merupakan satu-satunya wilayah di Kecamatan Lembor yang memiliki daya tarik wisata berbasis budaya agraris, yakni *Lingko Lodok*. Penetapan *Lingko Lodok* sebagai destinasi wisata belum diikuti dengan pengelolaan yang optimal, baik dari sisi partisipasi masyarakat maupun keterlibatan pemerintah desa secara menyeluruh. Hal ini menjadi dasar penting untuk mengeksplorasi lebih jauh bagaimana peran pemerintah desa dijalankan dalam mengelola dan mengembangkan potensi tersebut.

Fokus penelitian diarahkan pada empat dimensi peran pemerintah desa, yaitu sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator, dan stimulator. Setiap dimensi dianalisis berdasarkan indikator operasional yang dikembangkan dari studi sebelumnya (Amalia Sya'bani dkk., 2023; Maddimunri, 2015), seperti upaya promosi wisata, pembentukan kelompok sadar wisata, pengelolaan fasilitas, serta insentif bagi pelaku lokal. Penentuan informan dilakukan melalui teknik purposive dan aksidental sampling, dengan total 14 informan yang terdiri atas kepala desa, ketua Pokdarwis, petani pemilik lahan, wisatawan, pemilik penginapan, dan penyewa stan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen peraturan desa, laporan RPJMDes, artikel, serta dokumentasi visual (Sugiyono, 2019). Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara semi-terstruktur, studi dokumentasi, dan triangulasi sebagai bentuk validasi silang antara data dan sumber.

Analisis data dilakukan dengan mengikuti model interaktif Miles dan Huberman (2014) yang mencakup empat tahap: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini dilakukan secara terus-menerus selama penelitian hingga data dianggap jenuh dan temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara konseptual dan empiris.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

Untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam pengembangan destinasi wisata *Lingko Lodok* di Desa Poco Rutang, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, penelitian ini menggunakan kerangka teori yang dikemukakan oleh Blakely (1989 dalam Tomlinson, 1990). Teori ini memetakan peran pemerintah lokal ke dalam empat dimensi utama, yakni sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator, dan stimulator. Keempat peran tersebut digunakan sebagai lensa analisis untuk memahami sejauh mana pemerintah desa berkontribusi dalam mendorong pembangunan pariwisata lokal berbasis potensi dan partisipasi masyarakat. Pendekatan ini dinilai relevan untuk mengevaluasi fungsi strategis pemerintah desa dalam konteks pembangunan wilayah berbasis aset lokal dan pemberdayaan komunitas.

a. Peran Pemerintah Desa sebagai Entrepreneur dalam Pengembangan Wisata *Lingko Lodok*

Peran pemerintah desa sebagai *entrepreneur* dalam pengembangan destinasi wisata *Lingko Lodok* di Desa Poco Rutang tampak melalui berbagai inisiatif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor pariwisata. Inisiatif ini mencakup promosi wisata, penetapan tarif masuk, serta penyelenggaraan pelatihan pemandu wisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan. Pemerintah desa tidak hanya menjadi penggerak awal dalam membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), tetapi juga berupaya menumbuhkan kesadaran warga untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan destinasi.

Salah satu upaya utama adalah promosi wisata Lingko Lodok. Informan K (Wawancara, 08 Februari 2025) menjelaskan bahwa promosi telah dilakukan sejak tahun 2021, terutama melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, kanal YouTube, serta situs berita lokal. Konten promosi menonjolkan keunikan lanskap sawah berbentuk jaring laba-laba sebagai ikon utama desa. Observasi peneliti menunjukkan bahwa promosi ini berdampak positif pada peningkatan jumlah wisatawan pada tahun-tahun awal. Namun, sejak 2023, kegiatan promosi mengalami penurunan karena konten digital jarang diperbarui dan keterlibatan Pokdarwis dalam pemasaran berkurang. Hal ini menandakan bahwa kesinambungan dan pengelolaan strategi promosi belum berjalan optimal, sehingga keberhasilan awal tidak mampu dipertahankan.

Selain promosi, pemerintah desa juga telah menetapkan tarif tiket masuk melalui musyawarah bersama warga yang dituangkan dalam peraturan desa. Informan R (Wawancara, 08 Februari 2025) menyebutkan bahwa tarif ditetapkan sebesar Rp5.000 untuk pengunjung dewasa dan Rp2.000 untuk pelajar. Mekanisme ini dimaksudkan sebagai kontribusi wisatawan terhadap keberlanjutan destinasi. Namun, wawancara dengan anggota Pokdarwis dan pengunjung (13–14 Februari 2025) menunjukkan adanya ketidaksesuaian praktik di lapangan, di mana pelajar masih kerap dikenakan tarif dewasa. Meskipun demikian, mayoritas pengunjung menilai harga tiket relatif terjangkau. Kondisi ini menggambarkan adanya *gap* antara kebijakan formal dan implementasi, yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik apabila tidak segera diperbaiki.

Selanjutnya, pemerintah desa telah menginisiasi pelatihan pemandu wisata bagi pemuda lokal. Informan H (Wawancara, 08 Februari 2025) menjelaskan bahwa pelatihan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas generasi muda dalam penguasaan potensi lokal dan keterampilan bahasa asing. Akan tetapi, partisipasi pemuda terbilang rendah. Informan R (Wawancara, 13 Februari 2025) menambahkan bahwa meskipun beberapa pelatihan telah dilakukan, hingga kini belum ada pemandu wisata yang benar-benar siap beroperasi.

Rendahnya partisipasi pemuda ini dapat dianalisis melalui teori partisipasi masyarakat. Menurut Arnstein (1969), partisipasi yang efektif tidak sekadar hadir dalam kegiatan, tetapi melibatkan kontrol dan kepemilikan terhadap proses pembangunan. Dalam konteks ini, pemuda Desa Poco Rutang tampak belum melihat adanya ruang partisipasi bermakna yang memberi mereka peran strategis dalam pariwisata. Faktor lain adalah karakteristik generasi muda yang cenderung mencari peluang ekonomi instan dan mobilitas kerja ke luar desa. Hal ini sejalan dengan temuan (Nur, 2020) bahwa rendahnya minat generasi muda dalam sektor pariwisata berbasis desa sering dipengaruhi keterbatasan insentif, kurangnya penghargaan sosial, serta minimnya prospek karier jangka panjang. Dengan demikian, kendala partisipasi pemuda bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga berkaitan dengan struktur kesempatan dan orientasi sosial-ekonomi mereka.

Dari temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Poco Rutang telah menunjukkan peran *entrepreneurial* dalam tahap awal pengembangan destinasi wisata, seperti membentuk Pokdarwis, melakukan promosi digital, menetapkan tarif, dan menyelenggarakan pelatihan. Namun, hambatan berupa lemahnya kesinambungan promosi, ketidaksesuaian pelaksanaan tarif, serta rendahnya partisipasi pemuda memperlihatkan keterbatasan kapasitas desa dalam mengelola destinasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kelembagaan, pemberian insentif nyata bagi pemuda, serta strategi pemasaran yang lebih konsisten agar desa mampu memaksimalkan perannya sebagai *entrepreneur* dalam pembangunan ekonomi kreatif berbasis wisata.

b. Peran Pemerintah Desa sebagai Koordinator dalam Pengembangan Wisata *Lingko Lodok*

Dalam pengembangan destinasi wisata Lingko Lodok, pemerintah Desa Poco Rutang tidak dapat bekerja sendiri. Keterlibatan berbagai pihak eksternal seperti PLN, PAM, perusahaan swasta,

serta masyarakat lokal menjadi kebutuhan penting agar pengelolaan wisata berjalan secara sinergis. Posisi pemerintah desa dalam konteks ini terlihat jelas sebagai koordinator yang berfungsi menjembatani komunikasi dan membangun kerja sama antaraktor.

Koordinasi dengan PLN menjadi salah satu contoh nyata. Pemerintah desa mengajukan permohonan pemasangan jaringan listrik khusus, mengingat sebelumnya aliran listrik hanya bersumber dari rumah warga terdekat. Menurut penuturan Informan K (Wawancara, 08 Februari 2025), setelah jaringan permanen dipasang, kawasan wisata menjadi lebih terang dan mendukung aktivitas pengunjung maupun pelaku usaha pada malam hari. Namun, ia juga menambahkan bahwa kondisi tersebut memunculkan masalah baru berupa pencurian lampu dan aktivitas tidak produktif dari kelompok pemuda. Temuan ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur teknis, apabila tidak diikuti dengan pengawasan sosial, justru dapat menimbulkan kerentanan baru dalam pengelolaan wisata.

Koordinasi lain dilakukan dengan Perusahaan Air Minum (PAM) terkait penyediaan air bersih. Lokasi wisata sebelumnya tidak memiliki sumber air permanen, sementara saluran irigasi hanya difungsikan untuk pertanian. Kerja sama ini terbukti membantu pelaku usaha makanan dan minuman memenuhi kebutuhan dasar wisatawan secara lebih higienis.

Pemerintah desa juga menjalin kemitraan dengan PT. Jelajah Komodo melalui program pelatihan pemandu wisata. Menurut Informan J (Wawancara, 12 Februari 2025), meskipun pelatihan telah dilakukan beberapa kali, efektivitasnya masih terbatas karena mayoritas peserta adalah lulusan SMP dan SMA dengan keterbatasan pemahaman tentang industri pariwisata. Ia menjelaskan bahwa perusahaan mitra mengalami kesulitan dalam menyampaikan materi secara optimal akibat rendahnya kesiapan peserta. Situasi ini memperlihatkan adanya kesenjangan kapasitas yang berdampak pada rendahnya partisipasi generasi muda dalam kegiatan pariwisata.

Koordinasi horizontal dengan masyarakat internal pun menghadapi kendala yang cukup kompleks. Struktur sosial Desa Poco Rutang terbagi dalam tiga dusun, yakni Mi'is, Buruk, dan Wae Nakeng, sehingga komunikasi yang dibangun pemerintah desa seringkali tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Informan M (Wawancara, 11 Februari 2025) mengungkapkan bahwa pasca pemilihan kepala desa, ketegangan antara dua suku dominan semakin memperlemah partisipasi. Ia menegaskan bahwa hanya satu suku yang aktif mendukung pengelolaan Lingko Lodok, sementara suku lainnya lebih memilih pasif. Pemerintah desa sebenarnya telah berupaya melalui sosialisasi tentang pentingnya menjaga kebersihan, keterlibatan dalam kegiatan ekonomi lokal, serta ajakan membuka usaha di sekitar lokasi wisata. Namun, seperti disampaikan Informan M, kesadaran kolektif masyarakat terhadap nilai strategis pariwisata belum sepenuhnya terbentuk.

Analisis terhadap data lapangan ini dapat dipahami melalui teori partisipasi masyarakat. Seperti yang dikemukakan Arnstein (1969) dan Pretty (1995), partisipasi memiliki tingkatan dari sekadar kehadiran simbolis hingga keterlibatan penuh dalam pengambilan keputusan. Situasi di Poco Rutang menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih berada pada tingkat partisipasi pasif, bahkan sekadar konsultatif, sehingga belum sampai pada tahap partisipasi interaktif. Hambatan sosial-politik berupa rivalitas antarsuku pasca pemilihan kepala desa semakin memperdalam persoalan, karena rendahnya tingkat kepercayaan sosial mengurangi ruang partisipasi bersama.

Sementara itu, rendahnya partisipasi pemuda dapat dianalisis melalui perspektif teori generasi muda. Inglehart (2020) menekankan bahwa generasi muda cenderung mencari ruang ekspresi, inovasi, dan pengakuan sosial. Namun, seperti yang tergambar dari penjelasan Informan J dan K, keterbatasan pendidikan formal serta minimnya literasi pariwisata menyebabkan pemuda tidak siap mengambil peran strategis. Alih-alih menjadi motor penggerak wisata, sebagian pemuda justru terjebak dalam *youth disengagement*, yakni kondisi ketika mereka merasa terpinggirkan

dan kemudian menyalurkan energinya dalam aktivitas tidak produktif, bahkan destruktif seperti pencurian fasilitas wisata.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan fungsi koordinatifnya dengan cukup aktif melalui kerja sama dengan institusi eksternal. Akan tetapi, efektivitas koordinasi tersebut masih terbatas karena tidak diimbangi dengan pendekatan sosial yang mampu merangkul masyarakat dan pemuda secara lebih inklusif. Kehadiran pemerintah desa sebagai koordinator idealnya tidak hanya dilihat sebagai penghubung teknis, tetapi juga sebagai agen harmonisasi sosial yang mampu membangun kembali kepercayaan antar kelompok, meningkatkan kapasitas generasi muda, dan mendorong partisipasi masyarakat menuju bentuk kolaborasi yang sejati dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas.

c. Peran Pemerintah Desa sebagai Fasilitator dalam Pengembangan Wisata *Lingko Lodok*

Peran pemerintah desa sebagai fasilitator dalam pengembangan destinasi wisata *Lingko Lodok* mencerminkan upaya aktif dalam menyediakan sarana, regulasi, serta dukungan teknis dan sosial untuk menunjang aktivitas pariwisata berbasis masyarakat. Fasilitasi yang dilakukan pemerintah Desa Poco Rutang mencakup pembentukan kelembagaan lokal, penyusunan regulasi, pembangunan infrastruktur pendukung wisata, serta perhatian terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya para petani pemilik lahan sawah yang menjadi pusat daya tarik wisata.

Langkah awal fasilitasi yang dilakukan adalah pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai lembaga pengelola utama destinasi. Pokdarwis dibentuk melalui musyawarah bersama masyarakat, dengan tujuan menciptakan wadah koordinatif yang bertugas menjaga kebersihan lingkungan, memandu pengunjung, serta mengelola aktivitas wisata secara kolektif. Informasi dari informan K (Wawancara, 08 Februari 2025) dan R (Wawancara, 13 Februari 2025) menegaskan bahwa keberadaan Pokdarwis menjadi fondasi pengelolaan destinasi wisata, meskipun masih terdapat tantangan dalam kapasitas kelembagaan dan kesinambungan peran yang dijalankan.

Sebagai bentuk fasilitasi tata kelola, pemerintah desa juga menyusun peraturan desa terkait pengelolaan wisata *Lingko Lodok*. Regulasi ini memuat ketentuan mengenai pengelolaan aset, tarif masuk, penggunaan ruang, serta tugas dan tanggung jawab pelaku wisata. Informasi dari lapangan menunjukkan bahwa meskipun peraturan telah disusun secara formal dan disepakati dalam forum desa, implementasinya masih belum sepenuhnya optimal. Beberapa ketentuan belum dijalankan secara konsisten oleh pihak terkait, dan pengawasan terhadap pelaksanaannya masih terbatas.

Dalam hal pembangunan fasilitas fisik, pemerintah desa telah menyediakan sejumlah infrastruktur penting di sekitar lokasi wisata. Berdasarkan penjelasan informan K (Wawancara, 08 Februari 2025) dan R (Wawancara, 13 Februari 2025), fasilitas yang telah disiapkan mencakup dua unit toilet umum, akses jalan menuju lokasi wisata, spot foto, rumah adat Manggarai, panggung kesenian, lopo, lapak UMKM, pagar pembatas, dan tempat duduk. Infrastruktur ini bertujuan meningkatkan kenyamanan wisatawan serta mendorong partisipasi ekonomi masyarakat sekitar. Namun demikian, berdasarkan pengamatan peneliti dan wawancara dengan informan pengunjung dan pelaku usaha lokal (Wawancara, 10–15 Februari 2025), masih ditemukan kekurangan seperti tidak tersedianya penunjuk arah menuju lokasi, kebersihan lingkungan yang belum terjaga secara rutin, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan fasilitas.

Upaya pemerintah desa juga mencakup aspek pertanian sebagai bagian integral dari pengembangan wisata budaya, yang tercermin dalam perbaikan saluran irigasi untuk mendukung keberlanjutan sawah *Lingko Lodok* sebagai daya tarik utama destinasi. Petani sebagai pemilik lahan menjadi pihak penting dalam pengembangan destinasi ini. Sebelumnya, persoalan irigasi tidak banyak mendapat perhatian, namun pembukaan destinasi wisata mendorong pemerintah desa untuk memenuhi permintaan masyarakat tani. Informasi dari beberapa informan petani (Wawancara, 05 Februari 2025) menunjukkan bahwa perbaikan saluran irigasi disambut positif karena membantu menjaga produktivitas lahan dan memberikan manfaat langsung dari aktivitas wisata. Selain itu, saluran irigasi juga menjadi bagian dari atraksi wisata itu sendiri karena pengunjung kerap menggunakan airnya untuk membas tangan dan kaki setelah berkeliling.

Upaya lainnya adalah rencana pembukaan jalan tani sebagai bentuk peningkatan aksesibilitas antara spot wisata dan area persawahan. Jalan ini tidak hanya memudahkan petani, tetapi juga memungkinkan wisatawan untuk terlibat dalam aktivitas pertanian seperti berjalan di pematang sawah atau mengikuti proses tanam dan panen. Dalam forum Musrenbangdes yang diadakan pada 5 Februari 2025 dan wawancara dengan kepala desa serta beberapa petani, disebutkan bahwa jalan tani yang direncanakan akan menjadi alternatif akses yang aman dan layak, terutama saat musim hujan ketika jalur utama menjadi licin dan sulit dilalui. Inisiatif ini juga menunjukkan adanya integrasi antara pembangunan fisik dan melibatkan masyarakat dalam pengembangan wisata.

Secara keseluruhan, peran pemerintah desa sebagai fasilitator telah dijalankan dengan cukup baik. Berbagai bentuk dukungan telah diberikan, mulai dari pembentukan lembaga pengelola, penyusunan regulasi, pembangunan fasilitas, hingga pemenuhan kebutuhan dasar petani. Meski masih terdapat kekurangan dalam pemeliharaan dan koordinasi antarpihak, upaya fasilitasi ini memperlihatkan komitmen pemerintah desa untuk membangun destinasi wisata yang inklusif dan berkelanjutan.

d. Peran Pemerintah Desa sebagai Stimulator dalam Pengembangan Wisata *Lingko Lodok*

Peran stimulator merujuk pada upaya pemerintah desa dalam menciptakan rangsangan sosial dan ekonomi agar masyarakat lokal maupun pihak eksternal terdorong untuk turut aktif dalam pengembangan destinasi wisata. Di Desa Poco Rutang, peran ini ditunjukkan melalui dua bentuk utama: kebijakan potongan harga sewa lapak bagi pelaku usaha lokal dan pemberian insentif non-material kepada pengelola wisata dalam bentuk reward. Langkah-langkah ini bertujuan menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi warga serta meningkatkan motivasi bagi kelompok pengelola.

Salah satu bentuk stimulus yang diberikan adalah kebijakan potongan harga sewa lapak atau stan dagang. Pemerintah desa menyediakan area usaha di sekitar lokasi wisata *Lingko Lodok* dengan tarif sewa yang sangat terjangkau. Tujuannya adalah membuka peluang ekonomi seluas-luasnya bagi masyarakat setempat tanpa membebani mereka secara finansial. Berdasarkan informasi dari beberapa informan pelaku usaha lokal (Wawancara, 12 Februari 2025), kebijakan ini disambut positif. Mereka mengapresiasi kemudahan yang diberikan oleh pemerintah desa dan menyatakan bahwa biaya sewa yang rendah serta fasilitas yang tersedia telah mendorong mereka untuk membuka usaha di kawasan wisata. Hal ini menjadi indikasi bahwa kebijakan stimulatif yang diterapkan berhasil menggerakkan ekonomi lokal, terutama sektor perdagangan kecil.

Selain dukungan ekonomi, pemerintah desa juga menerapkan sistem reward dan punishment terhadap pengurus Pokdarwis sebagai bentuk evaluasi kinerja dan motivasi. Pokdarwis yang merupakan pengelola utama destinasi wisata mendapatkan evaluasi berkala oleh pemerintah desa. Setiap capaian kerja yang positif diberi apresiasi dalam bentuk simbolik seperti pemberian topi khas Manggarai atau selendang tenun *songke*. Meskipun hingga saat ini belum ada tindakan

hukuman (punishment) yang diberlakukan, sistem evaluasi rutin ini memberikan pesan yang jelas tentang pentingnya akuntabilitas dan tanggung jawab dalam mengelola destinasi wisata (Wawancara, 08 & 13 Februari 2025). Praktik ini menunjukkan adanya kesadaran pemerintah desa untuk membangun budaya kerja yang produktif dan berbasis penghargaan.

Secara keseluruhan, peran pemerintah desa sebagai stimulator telah dijalankan secara nyata melalui kebijakan yang memberikan dampak langsung terhadap pelaku usaha dan pengelola wisata. Strategi ini telah berhasil menciptakan iklim partisipatif dan memberi dorongan bagi masyarakat lokal untuk terlibat lebih aktif dalam kegiatan ekonomi dan pengelolaan wisata. Namun, keberlanjutan dari peran stimulator ini sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, penguatan kapasitas masyarakat, dan peningkatan efektivitas koordinasi di tingkat desa.

Dari keseluruhan peran yang telah dijalankan, sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator, dan stimulator dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Poco Rutang telah menunjukkan komitmen dalam mengembangkan destinasi wisata *Lingko Lodok*. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan di lapangan, langkah-langkah yang telah ditempuh mencerminkan adanya visi pembangunan berbasis potensi lokal dan partisipasi warga. Untuk memperkuat hasil yang telah dicapai, diperlukan upaya berkelanjutan dalam membangun sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya.

3.2 Pembahasan

Penelitian ini menemukan bahwa pengembangan destinasi wisata *Lingko Lodok* di Desa Poco Rutang sangat bergantung pada peran strategis pemerintah desa. Pemerintah desa berfungsi sebagai aktor sentral dalam mendorong potensi lokal melalui empat dimensi peran sebagaimana dikemukakan Blakely (1989 dalam Tomlinson, 1990): sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator, dan stimulator. Hasil-hasil temuan ini sejalan sekaligus memperkaya kajian teoretis dan empiris sebelumnya tentang desa wisata, serta mengemukakan kebaruan dalam konteks sosial dan geografis Manggarai Barat.

Sebagai entrepreneur, pemerintah desa menunjukkan kapasitas kelembagaan yang progresif. Pembentukan Pokdarwis, pengelolaan tiket masuk, serta inisiatif promosi melalui media sosial mencerminkan orientasi kewirausahaan desa yang mulai tumbuh. Hal ini mengafirmasi hasil studi oleh Umar et al. (2023) yang menyoroti pentingnya kepemimpinan politik dalam menggerakkan potensi ekonomi lokal melalui wisata berbasis komunitas, sebagaimana terlihat dalam studi Boonpring. Namun, tantangan keberlanjutan promosi digital menjadi catatan penting, yang juga dikemukakan oleh Rizal et al. (2023) bahwa promosi yang partisipatif dan konsisten merupakan kunci sukses pemasaran desa wisata.

Dalam peran sebagai koordinator, hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antarlembaga (PLN, PAM, swasta, masyarakat) telah dibangun, meskipun diwarnai oleh konflik internal antar kelompok warga. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Habibi (2022), yang menekankan pentingnya harmoni sosial dan rekonsiliasi antar kelompok dalam memastikan efektivitas kolaborasi pembangunan desa wisata. Dari konteks Poco Rutang, muncul temuan baru bahwa pemerintah desa bukan hanya bertindak sebagai koordinator, tetapi juga sebagai rekonsiliator sosial, yaitu agen yang menjembatani konflik pasca-pemilihan kepala desa guna merangkul kembali masyarakat untuk pembangunan bersama. Dimensi ini dapat dikembangkan sebagai perluasan model teoritik Blakely dalam konteks sosial post-konflik.

Sebagai fasilitator, pemerintah desa memberikan akses terhadap infrastruktur dasar seperti WC umum, akses jalan, lopo, rumah adat, panggung kesenian, hingga irigasi pertanian. Ini menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas tidak hanya berorientasi pada pengunjung, tetapi juga

pada kebutuhan petani pemilik lahan wisata. Temuan ini memperkuat kajian Rianto et al. (2021) serta Fahira et al. (2022) yang menyatakan bahwa kualitas fasilitas dan infrastruktur menjadi elemen esensial dalam kenyamanan wisatawan dan kesinambungan fungsi ekonomi lokal. Lebih lanjut, Andryani et al. (2023) mengusulkan integrasi pendekatan *community-based tourism* dengan rekayasa fasilitas adaptif untuk keberlanjutan desa wisata—perspektif ini mulai terlihat di Poco Rutang melalui pembukaan jalan tani dan pemeliharaan saluran irigasi.

Peran stimulator dijalankan melalui kebijakan pemotongan harga sewa lapak dan pemberian reward simbolik kepada anggota Pokdarwis. Pendekatan ini efektif membangun ekosistem sosial yang produktif dan berorientasi pada gotong royong. Sejalan dengan itu, Mulyana et al. (2022) dalam studi pengembangan desa wisata Tondok Bakarluh menunjukkan bahwa intervensi ringan seperti insentif sewa atau bentuk penghargaan memiliki dampak signifikan terhadap motivasi dan loyalitas pengelola lokal. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Iswanti & Zulkarnaini (2022) dalam pengelolaan Pulau Tilan, bahwa insentif berbasis sosial-budaya memperkuat solidaritas dalam tata kelola pariwisata berbasis warga.

Secara keseluruhan, penelitian ini tidak hanya mengafirmasi sejumlah teori dan temuan sebelumnya, tetapi juga menghadirkan kontribusi konseptual baru, yaitu perlunya mengintegrasikan dimensi *rekonsiliasi sosial* dalam peran pemerintah desa, terutama di wilayah yang mengalami konflik horizontal. Selain itu, pendekatan multisektoral yang dikombinasikan dengan pemberdayaan ekonomi mikro, sebagaimana dilakukan di Poco Rutang, menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan desa wisata terletak pada kolaborasi aktor dan sensitivitas terhadap dinamika sosial lokal.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat literatur mengenai *asset-based community development* (ABCD) dengan menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan desa wisata bukan hanya karena potensi fisik, tetapi karena kemampuan kelembagaan desa untuk mengaktifkan dan menyatukan berbagai kekuatan sosial, ekonomi, dan budaya. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi desa-desa lain: pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah desa, promosi digital yang strategis dan konsisten, serta integrasi pembangunan fisik dengan pendekatan rekonsiliasi dan pemberdayaan petani lokal.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Poco Rutang, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan keempat peran strategisnya sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator, dan stimulator dalam pengembangan destinasi wisata *Lingko Lodok*.

Sebagai entrepreneur, pemerintah desa telah menginisiasi promosi digital, menetapkan tarif tiket masuk, dan menyelenggarakan pelatihan pemandu wisata, meskipun hasilnya belum optimal karena masih terbatasnya partisipasi generasi muda dan rendahnya kontinuitas promosi. Sebagai koordinator, pemerintah berhasil membangun kemitraan dengan PLN, PAM, PT. Jelajah Komodo, dan menjalin komunikasi dengan masyarakat, meskipun tantangan sosial pasca pemilihan kepala desa masih menjadi hambatan dalam menyatukan dukungan dari seluruh kelompok warga.

Dalam peran sebagai fasilitator, pemerintah desa telah menyediakan sejumlah fasilitas fisik dan kelembagaan, seperti pembentukan Pokdarwis, penyusunan peraturan desa, pembangunan infrastruktur wisata, serta memperhatikan kebutuhan petani melalui perbaikan saluran irigasi dan rencana pembukaan jalan tani. Adapun peran sebagai stimulator tercermin melalui kebijakan

potongan harga sewa stan untuk pelaku usaha lokal serta pemberian reward simbolik bagi anggota Pokdarwis sebagai bentuk apresiasi dan motivasi.

Secara umum, pelaksanaan keempat peran tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa dalam mendorong pembangunan desa wisata berbasis potensi lokal dan partisipasi masyarakat. Namun demikian, keberhasilan jangka panjang sangat bergantung pada penguatan koordinasi lintas aktor, konsistensi implementasi kebijakan, serta peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat terhadap nilai strategis pariwisata sebagai penggerak ekonomi desa.

Daftar Pustaka

- Amalia Sya'bani, L., Risnawan, W., & Juliarso, A. (2023). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Wisata Kampung Sapi di Desa Guranteng Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya. <http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/3965>
- Andryani, N. L. F. S., Rahmawati, P. I., & Widiastini, N. M. A. (2023). Analisis Potensi dan Strategi Pengembangan Desa Wisata Dengan Menggunakan Model Community Based Tourism di Desa Pancasari. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 294. <https://doi.org/10.24843/JUMPA.2023.v10.i01.p14>
- Arnstein, S. R. (1969). *A Ladder Of Citizen Participation*. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Budhi Pamungkas Gautama, Yuliawati, A. K., Nurhayati, N. S., Fitriyani, E., & Pratiwi, I. I. (2020). Pengembangan Desa Wisata Melalui Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat. *Bernas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 355–369. <https://doi.org/10.31949/jb.v1i4.414>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Edition 5). SAGE Publications, Inc.
- Fahira, N. S., Umar, R., & Habibi, M. M. (2022). Peran pemerintah Desa Purworejo dalam pengembangan wisata alam Sumber Complang Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHIS)*, 2(3), 291–303. <https://doi.org/10.17977/um063v2i3p291-303>
- Habibi, M. M. (2022). Sinergi Peran Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 429. <https://doi.org/10.17977/um019v7i2p429-437>
- Inglehart, R. (2020). *Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv10vm2ns>
- Iswanti, S., & Zulkarnaini, Z. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Tilan di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 92–103. [https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8\(1\).9307](https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8(1).9307)
- Kememparekraf. (2022, Oktober 11). *Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2020-2024*. Kementerian Pariwisata. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/248527/permenpar-no-11-tahun-2022>
- Kirana, C. A. D., & Artisa, R. A. (2020). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance di Kota Batu. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 68–84. <https://doi.org/10.26618/kjap.v6i1.3119>
- Maddimunri, H. (2015). *PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN POTENSI WISATA ALAM BANTIMURUNG DI DINAS PARIWISATA KABUPATEN MAROS* [Skripsi]. Muhammadiyah.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (Edition 3). Sage.

- Moleong, L. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif* (Revisi Cetakan-38). PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, M., Pawan, A. P., & Maabuat, E. E. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Tondok Bakaru di Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 16–32. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v7i2.2797>
- Nur, Z. (2020). Partisipasi Pemuda Dalam Pengembangan Desa Wisata di Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda. *Jurnal Administrative Reform*, 7(1), 44. <https://doi.org/10.52239/jar.v7i1.3075>
- Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. (2021, Juni 23). *Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021–2026*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/184645/perda-kab-manggarai-barat-no-2-tahun-2021>
- Pemerintah Pusat Republik Indonesia. (2014, Januari 15). *Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa* (Jakarta). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- Pretty, J. N. (1995). Participatory Learning For Sustainable Agriculture. *World Development*, 23(8), 1247–1263. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(95\)00046-F](https://doi.org/10.1016/0305-750X(95)00046-F)
- Rianto, R., Prihantoro, K., Suhirwan, S., Santosa, A. I., Pramono, B., Saputro, G. E., & Prakoso, L. Y. (2021). Kebijakan Publik Desa Wisata Solusi Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 untuk Mendukung Ekonomi Pertahanan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(5), 1441–1450. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i5.921>
- Rizal, C., Zen, M., & Hendry. (2023). Optimalisasi Promosi Dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Desa Sei Limbat. *Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat (JURIBMAS)*, 2(2), 176–181. <https://doi.org/10.62712/juribmas.v2i2.118>
- Sambung, R. F. (2021). *Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Poco Rutang Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat* [Skripsi]. Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA.
- Sasongko, R. W. (2022). *Strategi Penguatan Ekonomi Pedesaan di Indonesia*. CV. Cendekia Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Syaifudin, M. Y., & Ma'ruf, M. F. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata (Studi di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo). *Publika*, 365–380. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p365-380>
- Tomlinson, R. (1990). Planning local economic development: Theory and practice, By Edward J Blakely, Sage Publications, Newbury Park, 1989. *Development Southern Africa*, 7(4), 743–750. <https://doi.org/10.1080/03768359008439548>
- Umar, F. Q., Tawakkal, G. T. I., & Sobari, W. (2023). Analisis Kepemimpinan Politik BUMDes Kerto Raharjo dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ekowisata Boonpring. *Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, 7(2). <https://doi.org/10.22219/satwika.v7i2.28072>
- Wahyuningsih, R., & Pradana, G. W. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa Hendrosari Melalui Pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu. *Publika*, 323–334. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p323-334>